

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Investigasi III dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Direktorat Investigasi III disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP Nomor SE-2488/SU/01/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja Tahunan di Lingkungan BPKP untuk Tahun Anggaran 2020.

Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tugas, fungsi, sasaran kegiatan, pengelolaan sumber daya serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Kami berharap semoga laporan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan peningkatan dan perbaikan kinerja seluruh jajaran pejabat dan staf pelaksana di Lingkungan Direktorat Investigasi III.

Jakarta,       Desember 2020  
Direktur Investigasi III

Gumbira Budi Purnama  
NIP 197112271999031001

# DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Tugas dan Fungsi	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Sumber Daya Manusia	3
D. Sistematika Penyajian	4
<b>BAB II PERJANJIAN KINERJATAHUN 2020</b>	5
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja	6
1. Ringkasan Kinerja	6
2. Uraian Kinerja	7
B. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2020	24
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Tugas dan Fungsi Organisasi

**S**esuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2019, Direktorat Investigasi III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli pada objek pengawasan instansi pemerintah pusat bidang kemaritiman, objek pengawasan badan usaha jasa keuangan, jasa penilai, dan manufaktur, objek pengawasan pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara, dan objek pengawasan kegiatan lain yang seluruh atau Sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Investigasi III menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli, audit investigatif penelusuran asset dan pemulihan kerugian negara, dan audit tujuan tertentu lainnya di bidang investigasi;
2. pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim, evaluasi hambatan kelancaran pembangunan, dan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral;

3. pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, konsultasi pencegahan kolusi, korupsi, dan nepotisme, dan tata Kelola serta pengendalian intern anti korupsi dan manajemen risiko kecurangan (*fraud*);
4. pelaksanaan pembinaan kapabilitas pengawasan intern bidang investigasi pada aparat pengawasan intern pemerintah dan satuan pengawasan intern badan usaha; dan
5. pelaksanaan kegiatan pengawasan di bidang investigasi berdasarkan penugasan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pada objek pengawasan.

## B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, struktur organisasi Direktorat Investigasi III terdiri atas:

1. Subdirektorat Investigasi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Badan Lainnya III;
2. Subdirektorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan III;
3. Subdirektorat Pencegahan Korupsi III; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

**Bagan 1.1**  
**Struktur Organisasi Direktorat Investigasi III**



## C. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Direktorat Investigasi III per 31 Desember 2020 sebanyak 25 orang. Pengklasifikasian jumlah pegawai berdasarkan golongan terdapat pada tabel 1.1, dan berdasarkan jabatan terdapat pada tabel 1.2.

**Tabel 1.1**  
Jumlah dan klasifikasi pegawai Direktorat Investigasi III berdasarkan golongan

GOLONGAN	RUANG					TOTAL
	a	b	c	d	e	
IV	2	3	-	-	-	5
III	3	7	5	3	-	18
II	-	-	2	-	-	2
I	-	-	-	-	-	-

**Tabel 1.2**  
Jumlah dan klasifikasi pegawai Direktorat Investigasi III berdasarkan jabatan

Uraian	Posisi 30-12-20
Struktural	
a. Eselon II	1
b. Eselon III	3
Fungsional Auditor	
a. Auditor Madya	1
b. Auditor Muda	7
c. Auditor Pertama	8
d. Auditor Penyelia	-
e. Auditor Pelaksana	2
Fungsional Umum	
a. Analisis Kepegawaian Muda	1
b. Pengadministrasi Umum	1
c. Sekretaris Pimpinan Tk. II	1

## D. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi uraian umum mengenai tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan sumber daya manusia Direktorat Investigasi III serta sistematika penyajian.

### **BAB II PERJANJIAN KINERJA**

Berisi uraian mengenai penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Berisi uraian mengenai capaian kinerja yang meliputi sasaran program dan sasaran kegiatan Direktorat Investigasi III, serta realisasi keuangan tahun 2020.

### **BAB IV PENUTUP**

Berisi uraian singkat mengenai keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja ke deputian, serta langkah-langkah perbaikan kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.

## BAB II

# PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen ini berisi sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan target kinerja yang diperjanjikan dalam satu tahun serta memuat rencana anggaran untuk kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan. Target dari indikator kinerja sasaran kegiatan ditetapkan dalam bentuk satuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik indikator yang digunakan. Satuan ditetapkan dalam bentuk kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur, sehingga dapat dinilai untuk menentukan tingkat keberhasilan dari masing-masing kegiatan.

Perjanjian Kinerja Direktorat Investigasi III Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengawasan atas Rencana Belanja	Nilai Efisiensi pengeluaran Negara/Daerah	<b>Rp1.000.000.000</b>
2.	Pengawasan atas Pengeluaran/Belanja Negara	Nilai temuan kerugian keuangan negara yang dilaporkan	<b>Rp239.559.000.000</b>
3.	Pengawasan atas Hambatan Kelancaran Pembangunan	Persentase Hambatan Kelancaran Pembangunan yang terselesaikan	<b>50%</b>
4.	Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Represif	Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan represif	<b>100%</b>
5.	Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Preventif	Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan preventif	<b>70%</b>

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Tahun 2020

#### 1. Ringkasan Kinerja

Pada tahun 2020, Direktorat Investigasi III menetapkan 5 (lima) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan perubahan tersebut, realisasi dan capaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.

Ringkasan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada setiap sasaran kegiatan terdapat pada tabel 3.1

**Tabel 3.1**  
**Ringkasan Kinerja Direktorat Investigasi III Tahun 2020**

No	Sasaran kegiatan/ IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
<b>I</b>	<b>Pengawasan atas Rencana Belanja</b>					
1.1	Nilai Efisiensi pengeluaran Negara/Daerah	Rp (juta)	1.000	0	0	●
<b>II</b>	<b>Pengawasan atas Pengeluaran/ Belanja Negara</b>					
2.1	Nilai temuan kerugian keuangan negara yang dilaporkan	Rp (juta)	239.559	10.605.538,75	4.427,11	●
<b>III.</b>	<b>Pengawasan atas Hambatan Kelancaran Pembangunan</b>					
3.1	Persentase Hambatan Kelancaran Pembangunan yang terselesaikan	Persentase	50	100	200	●

<b>IV. Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Represif</b>						
4.1	Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan represif	Persentase	100%	100	100	●
<b>V. Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Preventif</b>						
5.1	Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan preventif	Persentase	70	100	142,86	●

Keterangan: ● = mencapai/ melampaui target; ● = belum mencapai target

## 2. Uraian Kinerja

Realisasi kinerja Tahun 2020 berdasarkan sasaran kegiatan Direktorat Investigasi III dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai auditor intern pemerintah diuraikan di bawah ini:

### 2.1. Sasaran Kegiatan 1 Pengawasan atas Rencana Belanja

Sasaran kegiatan tersebut merupakan respon atas kondisi yang akan dicapai/diwujudkan oleh BPKP yang mencerminkan anggaran negara dan daerah yang dikelola memiliki manfaat terhadap pencapaian sasaran pembangunan dan bebas dari penyimpangan keuangan. Sasaran tersebut diukur dengan Nilai Efisiensi pengeluaran Negara/Daerah. Kegiatan bidang investigasi yang berkaitan dengan peningkatan ruang fiskal berupa efisiensi pengeluaran keuangan negara/daerah adalah audit klaim dan audit penyesuaian harga.

Target dan realisasi kinerja sasaran kegiatan tersebut terdapat pada Tabel 3.2.

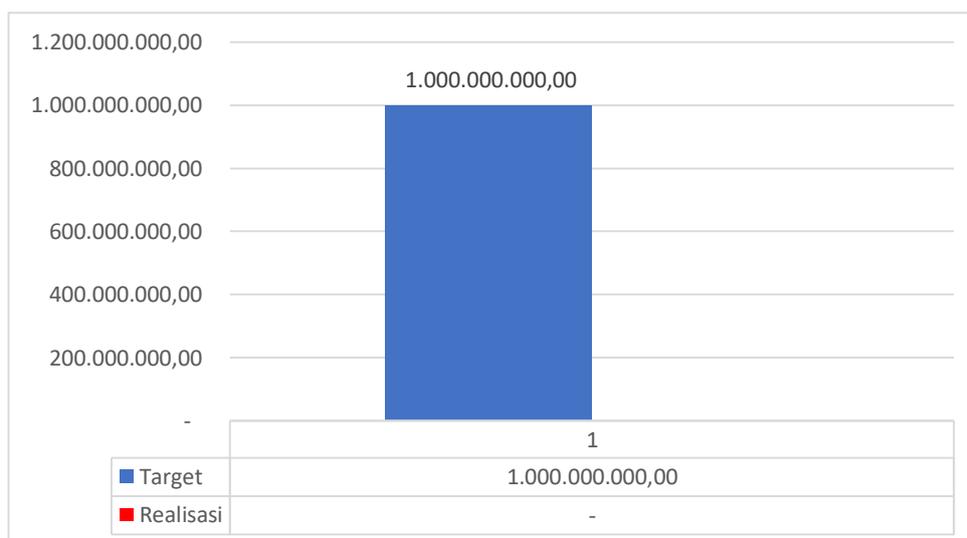
**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Kinerja Pengawasan atas Rencana Belanja Tahun 2020**

No	Sasaran kegiatan/ IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
1.1	Nilai Efisiensi pengeluaran Negara/Daerah	Rp (juta)	1.000	0	0	●

Pencapaian sasaran kegiatan 1: Pengawasan atas Rencana Belanja Indikator yang ditetapkan untuk menilai sasaran kegiatan ini adalah “Nilai efisiensi pengeluaran negara/daerah”. Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan nilai koreksi audit penyesuaian harga dan audit klaim, yaitu selisih antara nilai klaim dan nilai penyesuaian harga berdasarkan hasil evaluasi pemilik kerja yang sudah diterima pemohon dengan nilai klaim dan nilai penyesuaian harga berdasarkan hasil audit. Realisasi tahun 2020 sebesar Rp0 lebih rendah dibandingkan dengan target sebesar Rp1.000.000.000,00 atau mencapai 0%.

Target dan realisasi IKK dapat digambarkan dengan grafik berikut:

**Grafik 3.1**  
**Target dan Realisasi IKK nilai efisiensi pengeluaran negara/daerah Tahun 2020**



Dari Grafik 3.1 dapat dilihat bahwa realisasi IKK tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor penghambat/kendala pencapaian kinerja kinerja adalah adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan

anggaran infrastruktur tahun 2020 dialihkan untuk penanggulangan Covid-19. Dengan adanya pandemi Covid-19 pihak Penyedia dan Pengguna Barang/Jasa bersepakat melakukan addendum atas perpanjangan waktu yang sebagian merupakan dampak pandemi Covid-19, sehingga tidak terdapat nilai koreksi atas audit klaim.

Strategi/Rencana Tindak peningkatan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Terus menjalin komunikasi yang baik dengan K/L/P/BU.
2. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan teknis terkait penugasan klaim dan PH.

Tidak ada anggaran dan realisasi penggunaan dana pada kegiatan Pengawasan atas Rencana Belanja. Sedangkan penggunaan SDM sebanyak 150 OH atau 100% dari rencana sebanyak 150 OH.

Dari sisi penggunaan SDM, sasaran ini tidak dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 0%, lebih kecil daripada capaian penggunaan SDM sebesar 100%.

*Output* yang mendukung capaian IKK “nilai efisiensi pengeluaran negara/daerah” terdapat pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3**  
**Target dan Realisasi Pengawasan atas Rencana Belanja Tahun 2020**

No.	Uraian	Target	Realisasi	
		Nilai Efisiensi pengeluaran Negara/Daerah	Jumlah Laporan	Efisiensi pengeluaran Negara/Daerah
1	Laporan Audit Klaim	Rp1.000.000.000	1	0
	Capaian			0%

Kegiatan pengawasan atas rencana belanja yang dilaksanakan pada tahun 2020 yaitu Audit Klaim atas Patimbangan Port Development Project (I) JICA Loan No. IP-577 Paket 2 Pekerjaan Breakwater, Seawall dan Pengerukan Alur Pelayaran Taw Join Venture pada Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.



## 2.2. Sasaran Kegiatan 2

### Pengawasan atas Pengeluaran/ Belanja Negara

Sasaran kegiatan tersebut merupakan respon atas kondisi yang akan dicapai/diwujudkan oleh BPKP yang mencerminkan anggaran negara dan daerah yang dikelola memiliki manfaat terhadap pencapaian sasaran pembangunan dan bebas dari penyimpangan keuangan. Sasaran tersebut diukur dengan nilai temuan kerugian keuangan negara yang dilaporkan.

Target dan realisasi kinerja sasaran kegiatan tersebut terdapat pada Tabel 3.4.

**Tabel 3.4**  
**Target dan Realisasi Pengawasan atas Pengeluaran/Belanja Negara Tahun 2020**

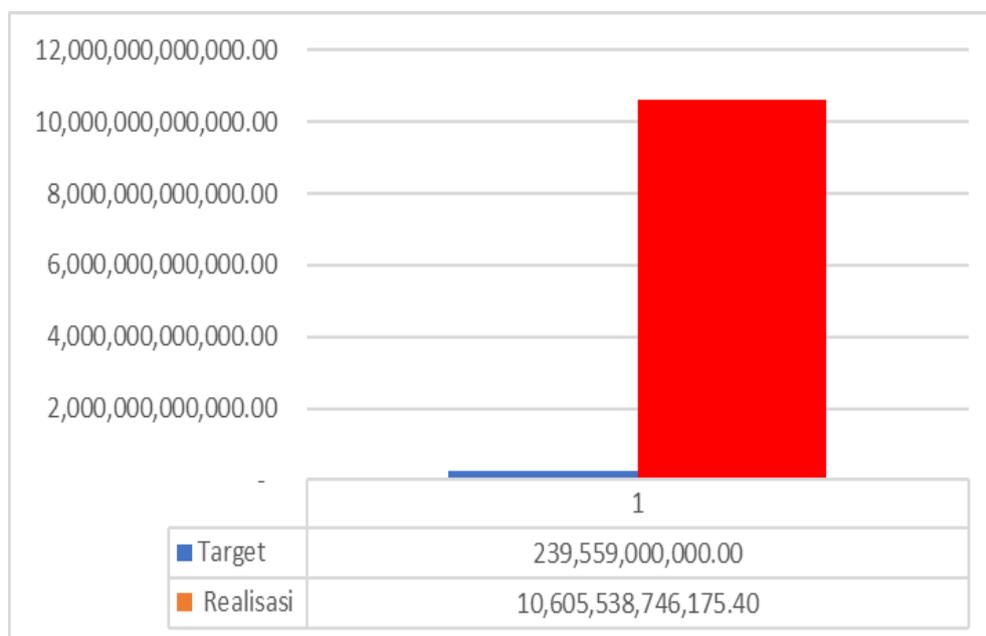
No	Sasaran kegiatan/ IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
2.1	Nilai temuan kerugian keuangan negara yang dilaporkan	Rp (juta)	239.559	10.605.538,75	4.427,11	●

Pencapaian sasaran program/ sasaran kegiatan 2: Pengawasan atas Pengeluaran/Belanja Negara

Indikator yang ditetapkan untuk menilai sasaran kegiatan ini adalah “Nilai temuan kerugian keuangan negara yang dilaporkan”. Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan jumlah nilai temuan kerugian keuangan negara yang dilaporkan dalam laporan hasil audit. Realisasi tahun 2020 sebesar Rp10,605,538,746,175.40 lebih tinggi dibandingkan dengan target sebesar Rp239.559.000.000,00 atau mencapai 4.427,11%.

Realisasi kinerja dihitung berdasarkan nilai kerugian keuangan negara yang dilaporkan dalam 5 (lima) laporan hasil audit. Target dan realisasi IKK dapat digambarkan dengan grafik berikut:

**Grafik 3.2**  
**Target dan Realisasi IKK nilai temuan kerugian keuangan negara yang dilaporkan Tahun 2020**



Dari Grafik 3.2 dapat dilihat bahwa realisasi IKK melebihi target yang telah ditetapkan.

*Output* yang mendukung capaian IKK “nilai temuan kerugian keuangan negara yang dilaporkan” terdapat pada Tabel 3.5

**Tabel 3.5**  
**Target dan Realisasi Pengawasan atas Pengeluaran Negara/Daerah Tahun 2020**

No.	Uraian	Target	Realisasi	
		Nilai Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Jumlah Laporan	Nilai Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	Laporan Audit Investigatif	-	4	10.594.343.810.762,20
2	Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara	-	1	11.194.935.413,25
	<b>Jumlah</b>	<b>239.559.000.000</b>	<b>5</b>	<b>10.605.538.746.175,40</b>
	<b>Capaian</b>			<b>4.427,11%</b>

## 2.3. Sasaran Kegiatan 3 Pengawasan atas Hambatan Kelancaran Pembangunan

Sejalan dengan fungsi BPKP melakukan pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, maka BPKP melakukan evaluasi dan memberikan solusi kepada instansi pemerintah dan korporasi untuk menyelesaikan permasalahan yang menghambat pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Target dan realisasi kinerja sasaran kegiatan pengawasan atas hambatan kelancaran pembangunan terdapat pada Tabel 3.6.

**Tabel 3.6**  
**Target dan Realisasi Kinerja Pengawasan atas Hambatan**  
**Kelancaran Pembangunan**  
**Tahun 2020**

No	Sasaran kegiatan/ IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
3.1	Persentase Hambatan Kelancaran Pembangunan yang terselesaikan	Persentase	50	100	200	●

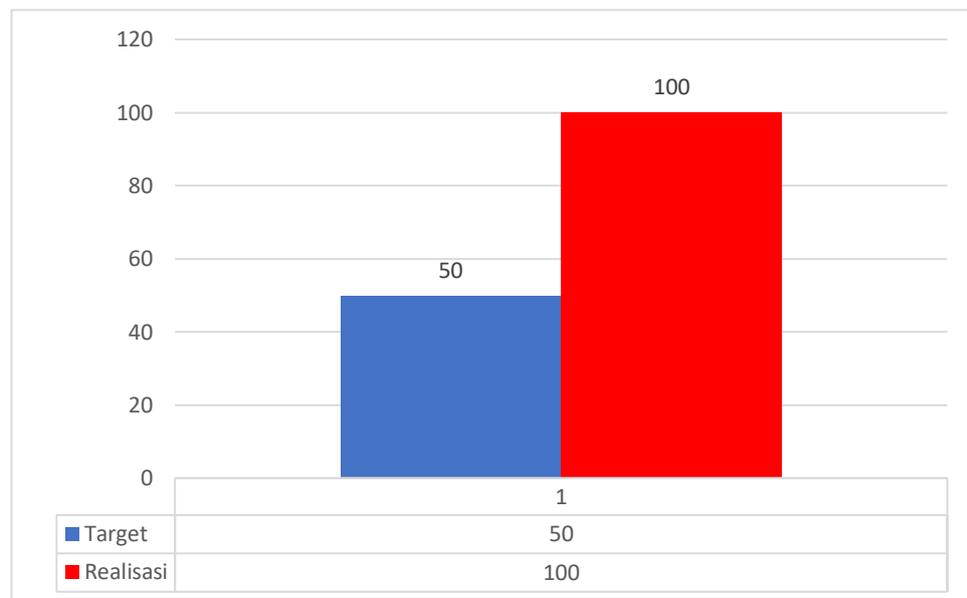
Pencapaian sasaran program/ sasaran kegiatan 3: Pengawasan atas Hambatan Kelancaran Pembangunan

Indikator yang ditetapkan untuk menilai sasaran kegiatan ini adalah “Persentase Hambatan Kelancaran Pembangunan yang terselesaikan”. Realisasi kinerja dihitung berdasarkan jumlah Laporan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) yang telah disampaikan kepada pihak terkait dibandingkan dengan jumlah Laporan EHKP yang diterbitkan HKP yang diselesaikan diartikan sebagai hasil penugasan EHKP yang berhasil membuahkan kesepakatan di antara para pihak yang berkepentingan terhadap hilangnya hambatan dan terlaksananya kesepakatan tersebut berupa pemilihan langkah penyelesaian dari alternatif penyelesaian yang

dihasilkan berkat mediasi dan evaluasi yang dilakukan BPKP. Realisasi tahun 2020 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan target sebesar 50% atau mencapai 200%.

Target dan realisasi IKK dapat digambarkan dengan grafik berikut:

**Grafik 3.3**  
**Target dan Realisasi IKK persentase hambatan kelancaran pembangunan yang terselesaikan Tahun 2020**



Dari Grafik 3.3 dapat dilihat bahwa realisasi IKK melampaui target yang telah ditetapkan. Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kesiediaan pimpinan terlibat secara langsung dalam proses evaluasi HKP dari aspek komunikasi antar lembaga.
2. Auditor investigasi memiliki kompetensi dalam melaksanakan penugasan evaluasi HKP.

Strategi/Rencana Tindak mempertahankan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Terus menjalin komunikasi yang baik dengan K/L/P/BU.
2. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan teknis terkait penugasan evaluasi hambatan kelancaran pembangunan.

Capaian sasaran kegiatan Pengawasan atas Hambatan Kelancaran Pembangunan didukung dengan realisasi dana sebesar

Rp20.475.000,00 atau 99,78% dari anggaran sebesar Rp20.520.000,00 dan penggunaan SDM sebanyak 1.053 OH atau 100% dari rencana sebanyak 1.053 OH.

Dari sisi penggunaan dana, sasaran ini telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 200%, lebih besar daripada capaian penggunaan dana sebesar 99,78%.

Dari sisi penggunaan SDM, sasaran ini telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 200%, lebih besar daripada capaian penggunaan SDM sebesar 100%.

*Output* yang mendukung capaian IKK “persentase HKP yang terselesaikan” terdapat pada Tabel 3.7.

**Tabel 3.7**  
**Target dan Realisasi Pengawasan atas Hambatan Kelancaran Pembangunan Tahun 2020**

Uraian	Target (laporan)	Realisasi (laporan)	Laporan ditindaklanjuti	% capaian
Laporan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan	1	2	2	100

Kegiatan pengawasan atas hambatan kelancaran pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2020 antara lain adalah:

1. Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan dalam rangka penyelesaian permasalahan aset-aset Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur. 
2. Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan atas Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban (I) JICA Loan IP-577 Paket 1 Kontrak Nomor PL.1020/01/VII/KTRPLN-PTB/2018 Tanggal 27 Juli 2018. 

## 2.4. Sasaran Kegiatan 4: Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Represif

Penyelenggaraan pengawasan keinvestigasian yang berorientasi represif bertujuan untuk mendeteksi, mengungkap, dan menindaklanjuti kejadian KKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam upaya penegakan hukum. Pelaksanaan penugasan bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha.

Target dan realisasi kinerja pengawasan bidang investigasi yang berorientasi represif terdapat pada Tabel 3.8.

**Tabel 3.8**  
**Target dan Realisasi Kinerja Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Represif Tahun 2020**

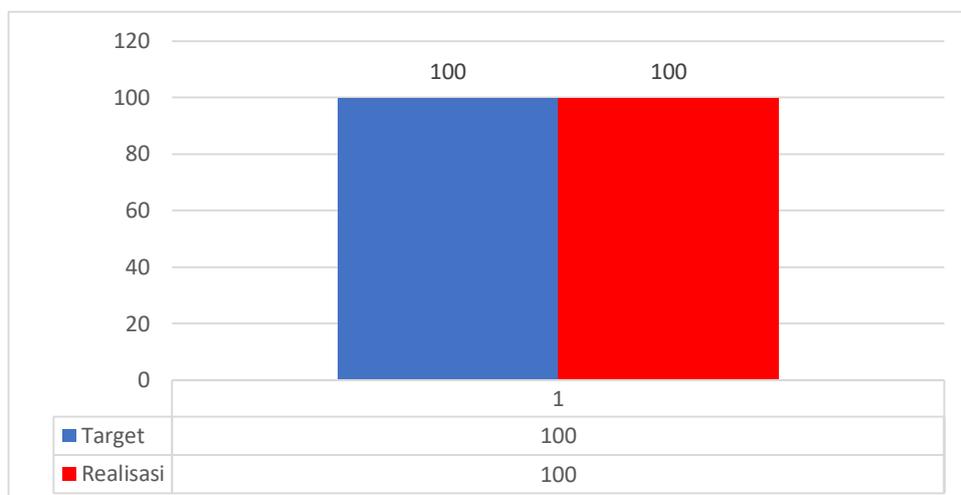
No	Sasaran kegiatan/ IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
4.1	Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan represif	Persentase	100	100	100	●

Pencapaian sasaran program/ sasaran kegiatan 4: pengawasan bidang investigasi yang berorientasi represif

Indikator yang ditetapkan untuk menilai sasaran kegiatan ini adalah "Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan represif". Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan Jumlah K/L/P/BU dan APH yang menindaklanjuti rekomendasi dibandingkan dengan jumlah penugasan pengawasan represif. Realisasi tahun 2020 sebesar 100% atau mencapai target sebesar 100%.

Realisasi kinerja dihitung berdasarkan jumlah KLPBU/APH yang menindaklanjuti rekomendasi sebanyak 15 laporan dibandingkan dengan Jumlah KLPBU sasaran pengawasan represif sebanyak 15 laporan. Target dan realisasi IKK dapat digambarkan dengan grafik berikut:

**Grafik 3.3**  
**Target dan Realisasi IKK persentase K/L/P/BU yang**  
**menindaklanjuti hasil pengawasan represif**  
**Tahun 2020**



Dari Grafik 3.3 dapat dilihat bahwa realisasi IKK mencapai target yang telah ditetapkan.

*Output* yang mendukung capaian IKK “persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan represif” terdapat pada Tabel 3.9.

**Tabel 3.9**  
**Target dan Realisasi Kinerja Pengawasan Represif**  
**Tahun 2020**

No.	Uraian	Target (laporan)	Realisasi (laporan)	Laporan ditindaklanjuti	% capaian tindak lanjut
1	Laporan Audit Investigatif	6	11	11	100
2	Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara	1	1	1	100
3	Laporan Pemberian Keterangan Ahli	2	3	3	100
	Jumlah	8	15	15	100

Kegiatan pengawasan represif yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Audit Investigatif atas kegiatan Skema Kredit Ekspor Berbasis Perdagangan (SKEBP) Rajungan pada PT Surveyor Indonesia (Persero) periode 2016 s.d. Januari 2019 dengan nilai kerugian keuangan yang dilaporkan sebesar Rp 21.628.550.757,12.
2. Audit Investigatif atas Pekerjaan Subkontraktor PT Krakatau Engineering pada Pekerjaan Proyek Pembangunan Blast Furnace Complex PT Krakatau Steel (Persero) pada tahun 2011 sampai dengan 2018 dengan nilai kerugian keuangan yang dilaporkan sebesar Rp58.203.364.941,20.
3. Audit Investigatif atas Penempatan Investasi Saham dan Reksadana oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2018 dengan nilai kerugian keuangan yang dilaporkan sebesar Rp10.477.702.176.252,00.



#### Pembahasan hasil audit dengan Kepala BPKP

4. Audit dengan Tujuan Tertentu atas Portofolio Utang Klaim pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahap I, dengan jumlah utang klaim yang sebanyak 15.953 polis dengan manfaat asuransi sebesar Rp469.327.382.874,00.
5. Audit dengan Tujuan Tertentu atas Portofolio Utang Klaim pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahap II, dengan jumlah utang klaim sebanyak 1.680 peserta dengan manfaat asuransi sebesar Rp92.222.734.851,00.
6. Audit Investigatif atas Kegiatan Penggunaan Jasa Perantara (Agen) pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) periode tahun

2017 sampai dengan Juni 2020 dengan nilai kerugian keuangan yang dilaporkan sebesar Rp36.809.718.811,87.

7. Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Kegiatan Pembangunan Kapal Perikanan pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016 dengan nilai kerugian keuangan yang dilaporkan sebesar Rp11.194.935.413,25.
8. Audit dengan Tujuan Tertentu atas Proses Pengadaan Komputer dan Laptop antara PT Mitra Buana Komputindo, PT Asiatel Globalindo, dan PT Telemedia Onyx Pratama dengan PT INTI (Persero) pada Tahun 2017.
9. Audit dengan Tujuan Tertentu atas Proses Permohonan s.d Penerbitan Jaminan Pembayaran a.n Principal PT Mitra Buana Komputindo, PT Asiatel Globalindo, dan PT Telemedia Onyx Prtama terkait dengan Perjanjian Pengadaan Komputer dan Laptop dengan PT INTI (Persero) pada Tahun 2017.
10. Audit dengan Tujuan Tertentu atas Jasa Profesional dan Beban Bunga pada PT Kimia Farma Tbk Th 2017 s.d 2020.
11. Audit Tujuan Tertentu atas Bantuan Subsidi Gaji pada Pekerja dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 pada BPJS TK.
12. Audit dengan Tujuan Tertentu atas Rencana Investasi Pemerintah dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional kepada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Tahun 2020.
13. Pemberian Keterangan Ahli di bidang akuntansi dan auditing terkait Laporan Hasil Audit Investigatif atas Penempatan Investasi Reksa Dana oleh PT ASABRI (Persero) Tahun 2012-2017.
14. Pemberian Keterangan Ahli perkara Dugaan Tindak Pidana Penyimpangan pasal 91 & 92 UU Njomor 8 Th 1995 tentang Pasar Modal yang terjadi pada Penempatan Investasi Saham dan Reksa Dana oleh PT ASABRI (Persero) Th 2014-2019.
15. Pemberian Keterangan Ahli di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi, perkara a.n terdakwa Ali Arifin.

Sasaran kegiatan 4 terkait dengan sasaran kegiatan 2. Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Auditor mempunyai kompetensi di bidang audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli, audit investigatif penelusuran aset dan pemulihan kerugian negara, dan audit tujuan tertentu lainnya di bidang investigasi sehingga dapat menyelesaikan penugasan dengan baik dan tepat waktu.
2. Deputi Bidang Investigasi terus menjalin komunikasi yang baik dengan melakukan pendekatan ke K/L/P/BU dan APH agar penugasan-penugasan yang dilaksanakan berjalan lancar.

Strategi/Rencana Tindak mempertahankan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Terus menjalin komunikasi yang baik dengan K/L/P/BU dan APH.
2. Melakukan pengalokasian tim sesuai dengan proporsi atau kebutuhan penugasan.
3. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan teknis terkait penugasan represif.

Capaian sasaran kegiatan Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Represif didukung dengan realisasi dana sebesar Rp575.451.954,00 atau 99,95% dari anggaran sebesar Rp575.764.000,00 dan penggunaan SDM sebanyak 3.520 OH atau 100% dari rencana sebanyak 3.520 OH.

Dari sisi penggunaan dana, sasaran kegiatan Pengawasan atas Pengeluaran/Belanja Negara dan Daerah ini telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 4.427,11%, lebih besar daripada capaian penggunaan dana sebesar 99,95%.

Dari sisi penggunaan dana, sasaran kegiatan Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Represif ini telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 100%, lebih besar daripada capaian penggunaan dana sebesar 99,95%.

Dari sisi penggunaan SDM, sasaran kegiatan Pengawasan atas Pengeluaran/Belanja Negara dan Daerah telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 4.427,11%, lebih besar daripada capaian penggunaan SDM sebesar 100%.

Dari sisi penggunaan SDM, sasaran kegiatan Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Represif telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 100% yang sama dengan capaian penggunaan SDM sebesar 100%.

## 2.5. Sasaran Kegiatan 5: Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Preventif dan Edukatif

Pengawasan bidang investigasi yang berorientasi preventif bertujuan mencegah terjadinya korupsi melalui penerapan sistem yang mampu mengendalikan korupsi melalui *Fraud Control Plan* (FCP) maupun *Fraud Risk Assessment* (FRA). Pengawasan bidang investigasi yang berorientasi edukatif bertujuan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman, perilaku serta budaya anti korupsi melalui proses pembelajaran informal yang terstruktur. Proses ini dilaksanakan melalui pembentukan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK).

Target dan realisasi kinerja pengawasan bidang investigasi yang berorientasi preventif dan edukatif terdapat pada Grafik 3.10.

**Tabel 3.10**  
**Target dan Realisasi Kinerja Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Preventif Tahun 2020**

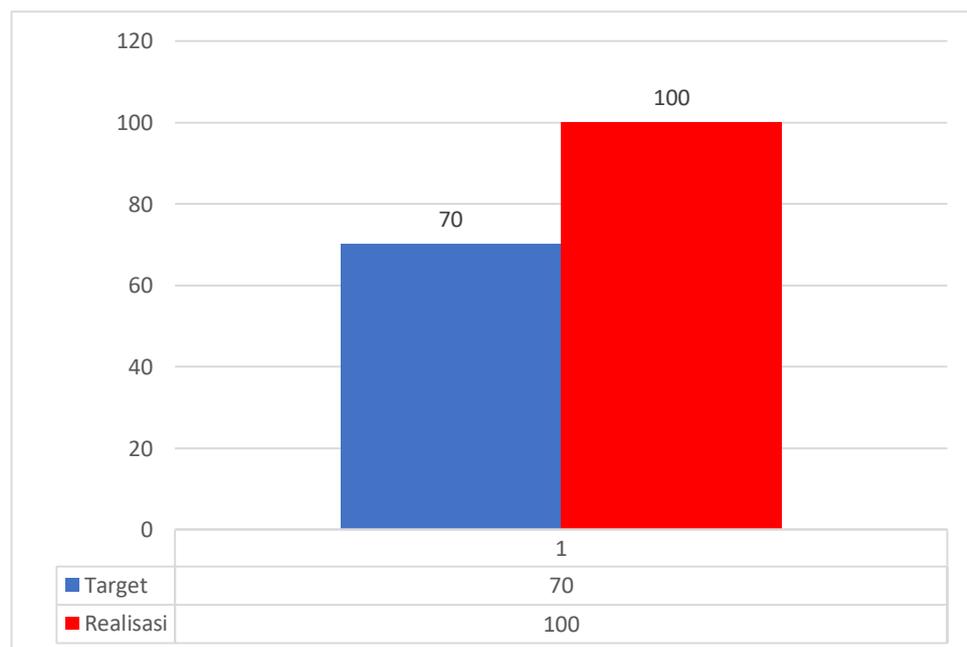
No	Sasaran kegiatan/ IKK	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
5.1	Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan preventif	Persentase	70	100	142,86	●

Pencapaian sasaran program/ sasaran kegiatan 5: pengawasan bidang investigasi yang berorientasi preventif dan edukatif

Indikator yang ditetapkan untuk menilai sasaran kegiatan ini adalah “Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan preventif dan edukatif”. Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan Jumlah KLPBU yang menindaklanjuti rekomendasi dibandingkan dengan Jumlah KLPBU sasaran pengawasan preventif/edukatif. Realisasi tahun 2020 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan target sebesar 70% atau mencapai 142,86%.

Realisasi kinerja dihitung berdasarkan Jumlah K/L/P/BU yang menindaklanjuti rekomendasi sebanyak 5 laporan dibandingkan dengan Jumlah K/L/P/BU sasaran pengawasan preventif/edukatif sebanyak 5 laporan. Target dan realisasi IKK dapat digambarkan dengan grafik berikut:

**Grafik 3.5**  
**Target dan Realisasi IKK persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan preventif dan edukatif Tahun 2020**



Dari Grafik 3.5 dapat dilihat bahwa realisasi IKK melampaui target yang telah ditetapkan. Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Deputi Bidang Investigasi terus menjalin komunikasi yang baik dengan melakukan pendekatan ke K/L/P/BU agar melakukan

pencegahan *fraud* dengan melakukan identifikasi *fraud* melalui kegiatan FRA dan menerapkan FCP.

2. Auditor mempunyai kompetensi di bidang pencegahan korupsi dan edukatif seperti *Fraud Control Plan (FCP)*, *Fraud Risk Assesment (FRA)*, Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK), dan Sosialisasi Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) sehingga dapat menyelesaikan penugasan dengan baik dan tepat waktu.

Strategi/Rencana Tindak peningkatan capaian kinerja/ mempertahankan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Terus menjalin komunikasi yang baik dengan K/L/P/BU.
2. Melakukan pengalokasian tim sesuai dengan proporsi atau kebutuhan penugasan.
3. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan teknis terkait penugasan preventif/edukatif.

Capaian sasaran kegiatan Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Preventif dan Edukatif didukung dengan realisasi dana sebesar Rp105.037.750.000,00 atau 99,82% dari anggaran sebesar Rp105.226.000.000,00 dan penggunaan SDM sebanyak 939 OH atau 100% dari rencana sebanyak 939 OH.

Dari sisi penggunaan dana, sasaran ini telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 142,86 %, lebih besar daripada capaian penggunaan dana sebesar 99,82%.

Dari sisi penggunaan SDM, sasaran ini telah dicapai secara efisien. Hal ini terlihat dari capaian kinerja sebesar 142,86%, lebih besar daripada capaian penggunaan SDM sebesar 100%.

*Output* yang mendukung capaian IKK “Persentase K/L/P/BU yang menindaklanjuti hasil pengawasan preventif dan edukatif” terdapat pada Tabel 3.11

**Tabel 3.11**  
**Target dan Realisasi Pengawasan Preventif dan Edukatif**  
**Tahun 2020**

Uraian	Target (laporan)	Realisasi (laporan)	Laporan ditindaklanjuti	% capaian
Laporan FCP	1	3	3	100
Laporan FRA	1	1	1	100
Laporan Kegiatan IEPK	1	1	1	100

Kegiatan pengawasan preventif/edukatif yang dilaksanakan pada tahun 2020 antara lain adalah:

1. Bimbingan Teknis *Fraud Control Plan* (FCP) pada PT Pupuk Indonesia (Persero).

Bimbingan Teknis dilaksanakan untuk melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut atas *diagnostic assessment* sebelumnya yang dilakukan pada PT Pupuk Indonesia. Hasilnya masih terdapat *Area of Improvement* yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak PT Pupuk Indonesia.



2. *Diagnostic Assessment Fraud Control Plan* PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

*Diagnostic Assessment* FCP dilakukan pada PT SMF dalam rangka untuk memberikan masukan terkait *Area of Improvement* dalam hal pengendalian korupsi yang dapat dibenahi oleh PT SMF.



3. Kajian pengendalian risiko kecurangan dalam rangka penyusunan rekomendasi strategis atas Program Prioritas Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi telah dilaksanakan atas 5 kegiatan



prioritas yaitu konektivitas jalan, konektivitas kereta api, konektivitas udara, konektivitas laut dan konektivitas darat.

4. Evaluasi *Fraud Control System* (FCS) pada BPJS Ketenagakerjaan.

Evaluasi *Fraud Control System* (FCS) pada BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan untuk menilai sejauh mana eksistensi, implementasi dan efektivitas atas sepuluh atribut FCS.



*Entry meeting* FCP di BPJS Ketenagakerjaan

5. Sosialisasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada PT Kimia Farma Tbk.

## B. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2020

Realisasi anggaran Direktorat Investigasi III tahun 2020 sebesar Rp700.784.704,00 atau terserap 99,90% dibandingkan dengan anggaran tahun 2019 sebesar Rp701.510.000,00. Rincian per jenis belanja dan per program dapat dilihat pada tabel 3.12 sampai dengan tabel 3.14.

**Tabel 3.12**  
**Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2020 menurut Jenis Belanja**

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	0	0	
2	Belanja Barang	701.510.000	700.784.704	99,90
3	Belanja Modal	0	0	
	Jumlah	701.510.000	700.784.704	99,90

**Tabel 3.13**  
**Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2020 menurut program/kegiatan**

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Terkait Investigasi 3			
1	Pengawasan Akuntabilitas dan Tata Kelola	430.209.000	430.042.846	99,96%
2	Rekomendasi Hasil Pengawasan Program Prioritas/Bidang	40.321.000	40.229.000	99,77%
3	Pengawasan Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	230.980.000	230.512.878	99,80%
	Jumlah	701.510.000	700.784.704	99,90

**Tabel 3.14**  
**Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2020 menurut sasaran kegiatan**

No	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pengawasan atas Rencana Belanja	0	0	
2	Pengawasan atas Pengeluaran/Belanja Negara	0	0	
3	Pengawasan atas Hambatan Kelancaran Pembangunan	20.520.000	20.295.000	98,90
4	Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Represif	575.764.000	575.451.954	99,95
5	Pengawasan Bidang Investigasi yang Berorientasi Preventif	105.226.000	105.037.750	99,82
	Jumlah	701.510.000	700.784.704	99,90